

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN

M.Fajrianor¹, M. Husaini², Siti Raudah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : muhammadfajrianor70799@gmail.com, muhammadhusaini10081986@gmail.com,
siti.raudah@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ditemukan terkait implementasi Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam meliputi Kondisi lingkungan yang kurang baik, sumber daya yang kurang memadai, dan *hubungan antar organisasi* yang kurang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dilihat dari: 1) kondisi lingkungan meliputi kondisi geografis kurang baik, kondisi sosial masyarakat sudah tepat, kondisi ekonomi masyarakat sudah tepat. 2) hubungan antar organisasi meliputi dukungan antar instansi tergolong baik, kerjasama antar organisasi kurang baik koordinasi antar instansi tergolong baik. 3) sumber daya meliputi sumber daya manusia yang kurang baik, sumber daya finansial cukup efektif, kondisi sarana dan prasarana masih kurang optimal. 4) karakter institusi implementor meliputi kesanggupan melaksanakan tugas dinilai kurang baik, kemampuan petugas dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana banjir ini tergolong kurang optimal, komitmen melaksanakan tugas yang dinilai baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi faktor pendorong yakni komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas, kemudian faktor penghambat meliputi *kurang baiknya drainase atau saluran air menyebabkan banjir kurang dapat teratasi dengan baik*, terbatasnya Anggaran Untuk Penyaluran Bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak banjir dan Kurangnya Jumlah Personil dalam Penanggulangan Bencana.

Kata kunci: Implementasi, Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

ABSTRACT

Problems found related to the implementation of providing social assistance to victims of natural disasters include poor environmental conditions, inadequate resources, and poor relationships between organizations. The aim of the research is to determine the implementation of Balangan Regent Regulation Number 11 of 2022 concerning Providing Social Assistance for Natural Disaster Victims in South Paringin District, Balangan Regency and the factors that influence it. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research state that the implementation of Providing Social Assistance for Natural Disaster Victims is seen from: 1) environmental conditions including unfavorable geographical conditions, the social conditions of the community are appropriate, the economic conditions of the community are appropriate. 2) relations between organizations including support between agencies are classified as good, cooperation between organizations is not good, coordination between agencies is classified as good. 3) resources include poor human resources, financial resources are quite effective, the condition of facilities and infrastructure is still less than optimal. 4) the character of the implementing institution includes the ability to carry out the task which is considered not good, the ability of the officers in providing flood disaster assistance is classified as less than optimal, the commitment to carry out the task is considered good. Influencing factors include driving factors, namely high commitment in carrying out tasks, then inhibiting factors include poor drainage or water channels causing flooding to be less able to be handled properly, limited budget for distributing aid to communities affected by flooding and a lack of personnel in response Disaster.

Keywords: Implementation, Social Assistance for Natural Disaster Victims

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan yang memiliki potensi serta intensitas realisasi pasal 10 ayat (1) Undang kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu fungsi pemerintah dalam hal Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

Banjir menghancurkan kawasan pemukiman serta aset infrastruktur publik. Meski masyarakat Kecamatan Paringin Selatan turut aktif dalam penanggulangan banjir, khususnya dalam kegiatan tanggap darurat, namun bencana banjir menambah biaya perbaikan kawasan pemukiman yang rusak dan tidak layak huni. Banjir menghancurkan kawasan pemukiman serta aset infrastruktur publik. Meski masyarakat Kecamatan Paringin Selatan turut aktif dalam penanggulangan banjir, khususnya dalam kegiatan tanggap darurat, namun bencana banjir menambah biaya perbaikan kawasan pemukiman yang rusak dan tidak layak huni. Persoalan banjir di Kecamatan Paringin Selatan rupanya tak mampu menggagalkan segala upaya pemerintah di masing-masing kecamatan. Pemerintah daerah selama ini hanya memfokuskan upaya penanggulangan banjir pada peraturan yang melarang pembuangan sampah di selokan atau sungai. Kabupaten Balangan merupakan daerah pegunungan yang juga rawan terhadap banjir dan bencana alam lainnya. Camat Paringin Selatan memahami, Daerah Paringin Selatan mempunyai aliran sungai yang mengalir dari Pegunungan Meratus, beberapa penghuninya justru tinggal di pemukiman yang dekat dengan aliran air. Akibatnya air sungai di Pegunungan Meratus akan meluap ke sungai di Balangan, khususnya sungai di Kecamatan Paringin Selatan, jika hujan deras. Pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah banjir, seperti meningkatkan sistem resapan air dan bekerja sama dengan masing-masing kecamatan, namun semua upaya tersebut tidak akan efektif tanpa kerja sama yang baik dari masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Balangan juga merasa khawatir dengan bencana alam seperti bencana banjir yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2017. Oleh karena itu, BPBD (Badan Pengurus Bencana Daerah Kabupaten Balangan) bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk memberikan bantuan berupa uang kepada masing-masing kecamatan. -Area untuk memperbaiki rumah yang terkena dampak banjir. Diketahui, meluapnya sungai Balangan dan Pitap di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, mengakibatkan 3.571 unit rumah terendam banjir. Hingga pukul 02.00 WIB tanggal 22 Maret 2023, Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan hal tersebut. Kerugian materiil yang terjadi adalah 931 unit rumah di Distrik Halong, 20 unit di Distrik Paringin, 576 unit di Distrik Juai, 336 unit di Distrik Paringin Selatan, 836 unit di Distrik Tebing Tinggi, dan 872 unit di Distrik Awayan. . Kegagalan Daerah Badan Pelaksana (BPBD) Kabupaten Balangan menginformasikan, hingga kini banjir belum surut, ketinggian air terlihat berkisar 50-150 cm. Selain itu, banjir tersebut menyebabkan 11.816 jiwa terdampak, menurut BPBD Kabupaten Balangan, antara lain warga Kecamatan Halong 2.952 orang, warga Kecamatan Paringin 93 orang, warga Kecamatan Juai 1.888 orang, warga Kecamatan Paringin Selatan 964 orang, warga Kecamatan Tebih Tinggi 2.828 orang, dan warga Kecamatan Awayan 3.091 orang. Warga masih menunggu kebijakan dari pemerintah kota terkait pelaksanaan dana bansos banjir yang belum merata di setiap kecamatan di Paringin Selatan karena dana yang disalurkan pemerintah Kabupaten Balangan

belum merata. didistribusikan secara merata di setiap kecamatan. Kebijakan yang disarankan untuk dipilih oleh pengambil kebijakan tidak menjamin keberhasilan penerapannya. Keberhasilan individu, kelompok, dan institusi dalam melaksanakan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial menjelaskan bantuan yang diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah berupa uang tunai kemudian pada Pasal 5 Besarnya pemberian bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan pada kriteria jenis bangunan; dan kerusakan fisik bangunan selain itu syarat Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang bedomisili di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, KK atau surat keterangan dari kepala desa.

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan selama ini dalam pelaksanaan program bantuan bencana alam masih tergolong belum optimal, hal tersebut dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan yang kurang baik seperti kurang tersedianya drainase untuk saluran air agar mempercepat turunnya air apabila terjadi banjir.
2. Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari target sasaran yang belum dapat tercapai secara optimal dikarenakan terbatasnya anggaran dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir di kecamatan Paringin Selatan diketahui di Kecamatan Paringin Selatan jumlah rumah yang terendam banjir adalah 336 unit dengan jumlah 964 jiwa sedangkan bantuan hanya mampu sebanyak 500 jiwa saja, terkait Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial pada pasal 3 mengenai Kriteria penerima Bantuan Sosial kepada korban Bencana Alam dan Bencana Sosial adalah seseorang atau keluarga atau masyarakat yang rumahnya rusak akibat Bencana Alam dan seseorang atau keluarga atau masyarakat yang rumahnya rusak akibat Bencana Sosial.
3. *Hubungan antar organisasi* yang kurang baik dilihat dari kerjasama antar instansi yang masih kurang optimal khususnya Dinas Sosial Kabupaten Balangan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Balangan serta Aparat Desa setempat yang menjadi objek bantuan Bencana Alam.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan”**.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan studi kasus Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 15 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan

1. Kondisi Lingkungan

a. Kondisi Geografi

Kondisi geografis di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan khususnya Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam memang rawan banjir dikarenakan drainase kurang baik sehingga masyarakat di wilayah tersebut membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa logistik makanan atau bantuan perbaikan rumah.

b. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam menjadi secara kondisi sosial tergolong kurang baik sehingga menjadi sasaran yang tepat diketahui bahwa cukup banyak masyarakat yang tidak bekerja selama musibah banjir sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan juga perbaikan rumah yang rusak diketahui mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Murung Abuin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan adalah Petani/Pekebun dengan jumlah 188 KK orang dari 485 KK, Baruh Bahinu Dalam Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan mayoritas adalah Petani/Pekebun dengan jumlah 275 KK orang dari 1050 KK sehingga dapat dikatakan secara kondisi sosial penduduk cocok sebagai objek penerima bantuan.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat tergolong kurang baik dilihat dari aspek tingkat pendapatan masyarakat Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam tergolong menengah kebawah dengan adanya Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan menjadikan masyarakat yang menganggur pada masa musibah banjir ini terbantuan namun memang belum dapat menyeluruh karena keterbatasan anggaran.

2. Hubungan antar organisasi

a. Dukungan antar instansi

Dukungan antar instansi sudah tergolong baik dalam hal koordinasi dan komunikasi penanggulangan bencana alam khususnya banjir dilihat dari koordinasi antara BPDB Kabupaten Balangan, Dinas Sosial, Relawan, serta pihak-pihak yang berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir tersebut.

b. Kerjasama Antar Organisasi Pelaksana kebijakan

Kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan tergolong kurang baik dikarenakan rendahnya koordinasi antara petugas dengan aparat desa diketahui dari hasil pendataan yang masih kurang sesuai masyarakat kurang memberikan informasi yang mendetail berkaitan dengan kriteria penerima bantuan hal tersebut disebabkan kurangnya komunikasi yang dilakukan untuk memverifikasi data penerima bantuan.

c. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antar instansi sudah tergolong baik dalam hal koordinasi dan komunikasi penanggulangan bencana alam khususnya banjir dilihat dari koordinasi antara BPDB Kabupaten Balangan, Dinas Sosial, Relawa, serta pihak-pihak yang berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir tersebut.

3. Sumber Daya

a. Sumber daya manusia

Sumber daya petugas pelaksana tergolong terbatas atau kurang baik dilihat dari ketersediaan jumlah petugas yang terbatas untuk pembagian tugas pendataan lapangan dan tugas untuk evakuasi lapangan sehingga apabila terjadi banjir petugas menjadi kewalahan.

b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial cukup baik dan memadai dilihat dari ketersediaan anggaran bantuan tidak ada kendala karena setiap Korban (KK) penerima bantuan menerima bantuan yakni sebesar Rp. 2.500.000,-.

c. Sumber daya prasarana

Kondisi sarana prasarana penunjang pelaksanaan program tergolong kurang baik dilihat dari sarana prasarana penanggulangan bencana masih kurang mencukupi seperti perahu karet, saran transportasi dan tenda penampungan yang kurang mencukupi.

4. Karakter institusi implementor

a. Kesanggupan Melaksanakan Tugas

Kesanggupan petugas tergolong kurang baik dilihat dari petugas tergolong kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir dikarenakan kurangnya jumlah personil namun untung saja ada relawan-relawan yang bergerak membantu mengurangi beban.

b. Kemampuan melaksanakan program

Kemampuan petugas dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana banjir ini tergolong kurang baik karena kemampuan BPBD secara mandiri masih kurang optimal dalam hal penanggulangan di lapangan seperti evakuasi korban ataupun penyaluran bantuan karena terbatasnya jumlah petugas.

c. Komitmen melaksanakan tugas

Komitmen petugas tergolong baik dalam melaksanakan tanggungjawab penanggulangan bencana alam khususnya banjir hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab serta rasa kemanusiaan yang tinggi.

Faktor Yang Mempengaruhi.

1. Faktor Pendorong

a. Ketersediaan Anggaran Dana yang memadai untuk Penyaluran Bantuan

Ketersediaan anggaran dinilai cukup baik untuk bantuan sudah ditentukan pada peraturan daerah seperti besaran bantuan untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan berkisaran dari Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,- tergantung kerusakan.

b. Kerjasama yang Tinggi dalam Melaksanakan Tugas

Kerjasama antar instansi sudah tergolong baik dalam hal koordinasi dan komunikasi penanggulangan bencana alam khususnya banjir dilihat dari koordinasi antara BPDB Kabupaten Balangan, Dinas Sosial, Relawan, serta pihak-pihak yang berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Kondisi Drainase/ Saluran Air yang kurang baik

Kondisi drainase di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan khususnya Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam memang rawan banjir dikarenakan drainase

kurang baik sehingga sudah sesuai dengan kriteria pemberian bantuan disebabkan banyak rumah masyarakat yang terdampak.

- b. Terbatasnya Anggaran Untuk Penyaluran Bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak banjir

Sasaran kurang efektif dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan tergolong tidak mampu dan menganggur pada masa musibah banjir ini hanya saja masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena keterbatasan anggaran dan pengalokasian.

- c. Kurangnya Jumlah Personil dalam Penanggulangan Bencana

Kemampuan petugas dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana banjir ini tergolong kurang baik karena kemampuan BPBD secara mandiri masih kurang optimal dalam hal penanggulangan di lapangan seperti evakuasi korban ataupun penyaluran bantuan karena terbatasnya jumlah petugas.

KESIMPULAN

1. Implementasi Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan (Studi di Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan) kurang baik dilihat dari: *Pertama*, pada aspek kondisi lingkungan meliputi kondisi geografis di Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam tergolong daerah rawan banjir dikarenakan sistem drainase yang kurang baik, kondisi sosial masyarakat yang kurang baik, kondisi ekonomi masyarakat masyarakat kurang baik. *Kedua*, pada aspek hubungan antar organisasi meliputi dukungan antar instansi tergolong baik dengan berkoordinasi terkait pelaksanaan penanggulangan bencana antara BPDB, Dinas Sosial atau relawan, kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan yang kurang baik, kemudian koordinasi antar instansi sudah tergolong baik. *Ketiga*, pada aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia yang kurang baik dilihat dari jumlah petugas pendataan di lapangan masih kurang cukup, sumber daya finansial cukup baik, kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana banjir masih kurang baik. *Keempat*, pada aspek karakter institusi implementor meliputi kesanggupan melaksanakan tugas dinilai kurang baik, kemampuan petugas dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana banjir ini tergolong kurang baik, komitmen melaksanakan tugas yang dinilai baik dilihat dari Petugas berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab dan ditunjang rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membantu para korban bencana alam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan (Studi di Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan) meliputi faktor pendorong yakni dukungan pemerintah dalam penanggulangan bencana, kemudian komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dilihat dari Petugas berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab dan ditunjang rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membantu para korban bencana alam, kemudian faktor penghambat meliputi *kurang baiknya drainase atau saluran air menyebabkan banjir kurang dapat teratasi dengan baik*, terbatasnya Anggaran Untuk Penyaluran Bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak banjir dan kurangnya jumlah Personil dalam Penanggulangan Bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. Perbup Balangan No.11 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- _____. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. STIA Amuntai. Edisi Revisi.
- _____. 2014. Aktor dan Pelaku Kebijakan Publik. Tersedia: <http://coretanduniapendidikan.blogspot.co.id/2014/11/aktor-dan-pelaku-kebijakan-publik.html> (30 September 2023)
- Agustino, Leo*. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Bandung
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2013. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P
- Indrayana, Cokorda Putra. 2022. "Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam". Universitas Ngurah Rai
- Kembuan, Michelle E L. 2018. "Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir Dikecamatan Tikala Kota Manado". Universitas Sam Ratulangi
- Miles, M., A.M.Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative data analysis A methods sourcebook Ed.3*. America: Sage publications.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Piramida, Kiki. 2019. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. STIA Amuntai
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara



Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, Teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Suplirahim. 2013. *Implementing Public Policy*. Tersedia: <http://akpsuplirahim2013.blogspot.co.id/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html> (30 September 2023)

Yowanita, Sefni. 2016. *Jenis-Jenis Kebijakan*. Tersedia: http://sefniyowanita.blogspot.co.id/2016/10/jenis-jenis-kebijakan_2.html (30 September 2023)